

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, 2011, UNY Press
- Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administarsi Negara*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2013
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press Mataram, 2020  
S. F. Marbun, *Hukum Administarsi Negara I*, Yogyakarta, FH UII Press, 2018
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007
- Sjamsiar Sjamsudiin Indrardi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang, 2019
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2015
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2015
- Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2005

Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2014

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 75)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586)

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 10/B/2021/PTTUN-MD dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337 K/TUN/2021 dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 65 PK/TUN/2023 dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

### Jurnal, Artikel, Tesis

Dita Tania Pratiwi, Kewenangan Lembaga Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatannya, *Thesis*, Universitas Tarumanegara, 2022

Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, September 2018

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya, *Jurnal Mimbar*, Vol. 23, Nomor 1, Februari 2011

E Nurhaini Butar-Butar, Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum, *Jurnal Yustisia* Vol. 1 No. 1, Januari-April, 2012

Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, 3 Oktober 2007

Inda Feby Rahayu “Kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN/PBR), *Thesis*, Universitas Andalas

Laurensia Frida Alfiani, Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional, *Jurnal Jatiswara*, Vol. No. 1 Maret 2021

Muhammad Amin Putra, Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 1 Februari 2020

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, sebagaimana dikutip oleh Nafiatul Munawaroh, 2023, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>

Ridwan, Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Persidensial, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Res Pulica*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020